

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara umum selama kondisi makro ekonomi Jawa Tengah per triwulan III tahun 2015 relatif melambat apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hanya sebesar 5%, atau lebih rendah 0,4% dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III 2014 yang mencapai 5,4%. Kondisi ini dipengaruhi oleh perekonomian global yang sedang melambat serta melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat sehingga turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Sedangkan untuk angka inflasi Jawa Tengah pada 2015 sebesar 2,73%, lebih rendah dari kondisi 2014 sebesar 8,22%. Komoditas yang memberikan sumbangan atas rendahnya tingkat inflasi di Jawa Tengah selama tahun 2015 antara lain BBM, Bahan Makanan (cabai merah, cabai rawit, dan minyak goreng), serta semen. Rendahnya angka inflasi ini tentunya meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong peningkatan omzet Koperasi dan UMKM, dimana hingga posisi Desember 2015 omzet Koperasi sebesar Rp. 47,218 trilyun (tumbuh 11,66%, yoy) dan omzet UMKM binaan sebesar Rp 29,113 trilyun (tumbuh 18,41%, yoy).

Berdasar Hasil Proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Jawa Tengah pada 2015 diperkirakan mencapai 33,77 juta jiwa, dimana per Desember 2015 7,808 juta jiwa diantaranya merupakan anggota koperasi atau 23,11%. Dengan jumlah koperasi sebanyak 28.227 unit yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota, 23.059 unit (81,69%) merupakan koperasi aktif dan hanya 5.168 unit (18,31%) merupakan koperasi tidak aktif. Sektor Koperasi dan UMKM juga berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah, dimana per Desember 2015 tenaga kerja yang bergerak pada sektor Koperasi sebanyak 138.444 orang, sedangkan dari sisi UMKM Binaan, tenaga kerja yang terserap mencapai 714.740 orang.

Selama Tahun 2014 upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan. Adapun fokus program Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah pada 2015 adalah

pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP berbasis Koperasi serta pengembangan Desa Mandiri Produksi. Sesuai dengan target RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018, pada tahun 2015 jumlah produk OVOP ditargetkan sebanyak 140 orang di 35 Kabupaten/Kota dan mampu tercapai. Sedangkan untuk pengembangan Desa Mandiri Produksi telah diinisiasi di 6 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Blora, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sragen. Berbagai upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah selama tahun 2015 memperoleh apresiasi dari Pemerintah Pusat, yaitu Penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Jasa bagi Gubernur Jawa Tengah dari Presiden Republik Indonesia atas perannya dalam mendorong pengembangan dan pemberdayaan KUMKM di Jawa Tengah secara sinergis dan berkesinambungan, serta Penghargaan Percepatan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil Terbanyak se-Indonesia dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia atas upaya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dalam upaya percepatan pemberian Izin Usaha Mikro Kecil

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Setelah upaya perencanaan dan pelaksanaan program – program pembangunan, perlu dilakukan evaluasi program/kegiatan guna mengetahui sejauh mana efektivitas atas program/kegiatan yang sudah dilakukan terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan visi misi suatu instansi. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dokumen LKjIP sendiri disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta

sebagai alat penilaian dan pengendalian dalam rangka memacu peningkatan kinerja organisasi.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2008 Tentang penjabaran Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; maka sesuai Pergub Nomor 67 bab II bagian pertama, pasal 2, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok **“melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”**.

Adapun Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota;
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas menurut pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 tahun 2008, Kepala Dinas dibantu/membawahkan:

1. Sekretariat;
2. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

4. Bidang Peberdayaan Koperasi;
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam;
6. UPTD Balatkop dan UMKM;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARPRAS

1. Susunan kepegawaian :

Jumlah pegawai/personil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah sebanyak 147 orang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil : 146 orang

Pekerja Harian Lepas : 1 orang

Tabel 1.
Kekuatan Personil PNS Menurut Golongan

BIDANG	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		JUMLAH
	P	W	P	W	P	W	P	W	
Sekretariat	2	0	6	1	11	17	1	2	40
Kelembagaan Koperasi & UMKM	1	0	3	1	9	4	1	2	21
Pemberdayaan UMKM	0	0	4	1	8	2	3	1	19
Pemberdayaan Koperasi	0	0	2	0	11	5	2	1	21
Pemberdayaan KSP	0	0	0	1	6	9	0	1	17
Balatkop	4	0	3	1	7	6	4	0	25
Diperbantukan KPU Jateng	0	0	0	0	1	0	1	1	3
JUMLAH	7	0	18	5	53	43	12	8	146

Tabel 2.
Kekuatan Personil PNS Menurut Pendidikan

BIDANG	SD		SMP		SMA		DIII		S1		S2		JUMLAH
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
Sekretariat	1	0	4	0	4	1	1	2	8	13	2	4	40
Kelembagaan Koperasi & UMKM	0	0	1	1	7	1	0	0	4	4	2	1	21
Pemberdayaan UMKM	1	0	1	0	2	0	3	0	5	3	3	1	19
Pemberdayaan Koperasi	0	0	1	0	4	1	0	0	4	4	6	1	21
Pemberdayaan KSP	0	0	0	0	0	1	0	0	6	8	0	2	17
Balatkop	1	0	4	0	5	4	0	0	4	2	4	1	25
Diperbantukan KPU Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
JUMLAH	3	0	11	1	22	8	4	2	31	34	19	11	146

Tabel 2.3.
Struktur Esselon PNS Menurut Jenis Kelamin

PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
Esselon II	-	1 orang	1 orang
Esselon III	3 orang	3 orang	6 orang
Esselon IV	8 orang	6 orang	14 orang
JUMLAH	11 orang	10 orang	21 orang

*Catatan : 3 PNS diperbantukan ke KPU Prov. Jateng dan 2 orang menduduki jabatan Esselon III dan 1 orang menduduki jabatan Esselon IV, dimana untuk Gaji dan TPP tetap dianggarkan pada Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi 1 (satu) orang widyaiswara yang ditempatkan pada UPTD Balaktop untuk mendukung pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat KUMKM.

2. Sarana dan Prasarana :

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Tanah dan Gedung Yang Dimiliki

NO	URAIAN	LUAS
1	Tanah 6 (enam) bidang terdiri dari	
	a. Tanah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	3.243 M ²
	b. Tanah UPTD Balatkop 1	5.500 M ²
	c. Tanah UMKM Center	2.617 M ²
	d. Tanah UPTD Balatkop 2	2.320 M ²
	e. Tanah PLUT KUMKM di Ds Dukuh Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas	927 M ²
	f. Tanah di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas	480 M ²
2	Bangunan Gedung 5 unit terdiri dari	
	a. Bangunan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	1.486 M ²
	b. Bangunan Balatkop	3.367 M ²
	c. Bangunan UMKM Center	1.650 M ²
	d. Bangunan PLUT KUMKM di Ds. Dukuh Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas	654 M ²
	e. Bangunan di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas	120 M ²

Tabel 4.
Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sejumlah 13 (tiga belas) unit terdiri dari : a. Honda Civic VTI Tahun 2001 (H 54) b. Toyota Kijang LGX Tahun 2004 (H 9504 VR) c. Toyota Innova G Diesel Tahun 2005 (H 9501 GR) d. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 HG) e. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 FR) f. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 CG) g. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 KG) h. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 PR) i. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 GZ) j. Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 (H 9529 ZR) k. Suzuki APV 1500 GL Tahun 2014 (H 9525 FZ) l. Toyota Innova Tahun 2014 (H 275) m. Isuzu Pick Up Tahun 2015 (H 9579 VG)	 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
2	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sejumlah 43 (lima puluh dua) unit terdiri dari a. Di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah b. Di Kota / Kabupaten Se Jateng	 8 unit 35 unit

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2015 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah memfokuskan pencapaian sasaran utama pada:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM;
2. Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal;
3. Peningkatan akses permodalan dan efektivitas pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM;
4. Peningkatan produktivitas jaringan pemasaran dan usaha Koperasi dan UMKM;
5. Peningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UMKM.

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah yaitu **"SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM"**. Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2015 telah menetapkan 5 program utama dan 48 kegiatan .

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana stretejik Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 - 2018 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2013 – 2018.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 yaitu "**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari – Mboten Korupsi Mboten Ngapusi**". Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut, maka SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi sebagai berikut "**SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM**". Makna yang terkandung dari visi diatas adalah :

SEJAHTERA

Sejahtera merupakan suatu kondisi dimana segala macam kebutuhan masyarakat terpenuhi, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam konteks pembangunan Koperasi dan UMKM, sejahtera berarti tercukupinya kebutuhan masyarakat Koperasi dan UMKM baik lahir maupun batin, dimana hal sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Mengingat bahwa kondisi sejahtera dinamis sesuai dengan tuntutan dan aspirasi yang berkembang, maka diperlukan upaya terus – menerus dalam penyempurnaan paket kebijakan, strategi program kegiatan serta pembinaan guna mewujudkan kondisi tersebut.

BERSAMA

Bersama merupakan suatu ikatan yang terbentuk atas dasar kesamaan tujuan maupun rasa kekeluargaan, dimana salah satu ciri utamanya adalah rasa saling memiliki dan kepedulian antar anggota terhadap kondisi dan arah hubungan yang terjalin. Dalam konteks pembangunan Koperasi dan UMKM, bersama berarti suatu hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Gerakan Koperasi dan UMKM, serta masyarakat dan para pemangku kebijakan lainnya dalam mensinergikan upaya pembangunan Koperasi dan UMKM guna memperoleh hasil yang optimal.

Dengan demikian visi "SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM" dapat didefinisikan sebagai upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat Koperasi dan UMKM melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat serta segenap pemangku kepentingan lainnya.

2. Misi

Visi tersebut dilaksanakan melalui Misi sebagai berikut:

- a. Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sbb:
 - 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan
 - 2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
 - 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
 - 4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
 - 5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
 - 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
 - 7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
- b. Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah adalah:
 - 1) Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.
 - 2) Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing.
 - 3) Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.
 - 4) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten.
 - 5) Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari misi untuk mewujudkan visi pembangunan Koperasi dan UMKM selama kurun waktu 2013-2018. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Misi ke-1 yaitu **Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.**
Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah.
Sasaran : Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah.
2. Misi ke-2 yaitu **Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing.**
Tujuan :
 - a. Meningkatkan Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah.
 - b. Meningkatkan daya saing KUMKM di Jawa TengahSasaran :
 - a. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah
 - b. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah.
3. Misi ke-3 yaitu **Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.**
Tujuan :
 - a. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah
 - b. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh KUMKMSasaran :
 - a. Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah
 - b. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi dan UMKM.
4. Misi ke-4 yaitu **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten**
Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM
Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM.
5. Misi ke-5 yaitu **Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM.**
Tujuan :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM
 - b. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas serta integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur

B. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2015

Dalam rencana kinerja Tahun 2015 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, sasaran, indikator, dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.
Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	1. Presentase Koperasi Aktif 2. Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas 3. Presentase Koperasi Sehat 4. Presentase Omset Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah	81,05% 43% 16,20% 6,50%
Bertambahnya jumlah produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	1. Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	140
Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah	1. Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi 2. Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina 3. Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi 4. Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina 5. Jumlah UMKM yang dibina	13% 11,15% 12,75% 10,85% 102.000
Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah	1. Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah	275 orang
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM	1. Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM	11,75%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM	1. Pengurus KUMKM yang terlatih	14.175
Meningkatnya kualitas serta integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan KUMKM antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Presentase kesesuaian perencanaan pemberdayaan KUMKM Pusat dan Daerah	100%
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	1. Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat	34

C. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

Dari Rencana Kinerja Tahunan diatas, setelah dilakukan pembahasan dan penajaman dengan pihak terkait, maka telah dilakukan Penetapan Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Daerah Tahun 2015, yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.
Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	1) Presentase Koperasi Aktif	81,05%	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM, Kegiatan : a. Peningkatan Pemasarakatan dan Kelembagaan Koperasi b. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi c. Pemingkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP d. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM	3.567.552.000
	2) Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas	43%		969.508.000
	3) Presentase Koperasi Sehat	16,20%		1.066.565.000
	4) Presentase omzet Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah	6,50%		779.636.000
2. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	1) Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	140		751.843.000
			Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kegiatan :	1.428.826.000
3. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah	1) Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi	13%	a. Peningkatan jaringan Produk KUMKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU)	240.273.000
	2) Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina	11,15%	b. Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM	988.846.000
	3) Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi	12,75%	c. Pelayanan Klinik Usaha bagi KUMKM	199.707.000
	4) Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina	10,85%	Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM, Kegiatan :	2.889.414.000
	5) Presentase UMKM yang telah mengakses kredit	24%	1. Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM	344.414.000
	6) Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM	10 Prov, 1 Luar Negeri	2. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil	2.545.000.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah	1) Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah	275	tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM	1) Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM	11,75%	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal, Kegiatan :	15.750.950.000
			1. Fasilitasi Perlindungan Produk UMKM	295.950.000
			2. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi	15.455.000.000
6. Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM	1) Pengurus KUMKM yang kompeten	14.175	Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan, Kegiatan :	1.389.683.000
			1. Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM	790.935.000
			2. Pengendalian Pembiayaan KUMKM	598.703.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2015 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja
3. Akuntabilitas Keuangan

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Hingga akhir tahun 2015, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai selama tahun 2015 adalah :

1. Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah
2. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jateng
3. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah
4. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM
6. Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM
7. Meningkatnya kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM
8. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian atas sasaran tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan sektor Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah, telah dilakukan pengukuran terhadap sasaran tersebut sebagai berikut :

a. Sasaran ke-1 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	1. Presentase Koperasi Aktif	1. 81,05%	1. 81,69%	1. 100,78%
	2. Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas	2. 43%	2. 43,73%	2. 101,69%
	3. Presentase Koperasi Sehat	3. 16,20%	3. 16,71%	3. 103,14%
	4. Presentase omzet Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah	4. 6,50%	4. Data belum tersedia	4. Data belum tersedia
Rata-Rata capaian sasaran ke-1				101,87%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-1**, dari 4 indikator kinerja terdapat 3 indikator yang sudah dapat diukur kinerjanya, dan ada 1 indikator kinerja yang belum dapat diukur, yaitu Presentase Omset Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah. Penyebab indikator tersebut belum dapat diukur adalah belum tersedianya data PDRB Jawa Tengah Tahun 2015 oleh BPS. Adapun untuk ketiga indikator

lainnya telah dapat diukur dan hasil rata – rata dari pengukuran ketiga indikator tersebut menunjukkan nilai sebesar 101,87% atau berpredikat **amat baik**.

Adapun penyebab capaian kinerja dari indikator tersebut mampu diatas target disebabkan antara lain :

1. Pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang semakin terfokus pada peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi.
2. Adanya dukungan pendampingan bagi Koperasi dari Pemerintah Pusat melalui Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Tenaga Pendamping.
3. Menghadapi kompetisi bisnis yang semakin kompetitif, mendorong peningkatan kesadaran Koperasi untuk melakukan pengelolaan usaha secara profesional.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan serta peningkatan kemampuan pengurus/pengelola Koperasi melalui Bimbingan Teknis serta Sosialisasi Peraturan tentang Perkoperasian.
2. Pemberian pendampingan secara berkelanjutan dan komprehensif dengan melibatkan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan serta Konsultan Pendamping di UMKM Center dan PLUT – KUKM.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan program kemitraan antara Pemerintah (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota) dengan Perguruan Tinggi serta BDS untuk memberikan pendampingan bagi Koperasi dan KSP dalam meningkatkan kualitas administrasi dan kelembagaannya.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pembina terkait peraturan – peraturan perkoperasian sehingga mampu memberikan advokasi secara baik dan benar kepada Koperasi.

b. Sasaran ke-2 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presen tase(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jateng	Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	140 Produk	140 Produk	100%
Rata-Rata capaian sasaran ke-2				100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-2**, dapat dilihat bahwa capaian sesuai dengan target (100%) atau berpredikat **baik**.

Upaya yang telah dilakukan guna mendukung pencapaian target tersebut antara lain :

1. Melakukan sosialisasi serta koordinasi secara aktif dengan Kabupaten/Kota untuk terus menggalakkan pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis OVOP di masing – masing daerah.
2. Memfasilitasi pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui pelibatan Perguruan Tinggi serta Tenaga Pendamping dalam meningkatkan kualitas produk OVOP.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Upaya pengembangan Produk Unggulan Daerah dilakukan secara kontinyu dan terintegrasi dengan tidak lupa memperhatikan selera pasar.
2. Mendorong peran aktif dari Universitas, Lembaga Riset, dan Perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi dari Produk Unggulan Daerah yang ada.
3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Kebijakan OVOP secara komprehensif.

c. Sasaran ke-3 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 9.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah	1. Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi	1. 13%	1. 18,50%	1. 142,31%
		2. 11,15%	2. 36,57%	2. 327,98%
		3. 12,75%	3. 12,82%	3. 105,08%
	2. Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina	4. 10,85%	4. 18,41%	4. 169,68%
		5. 10 Prov, 1 Luar Negeri	5. 10 Prov, 1 Luar Negeri	5. 100%
	3. Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi			
	4. Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina			
	5. Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM			
Rata-Rata capaian sasaran ke-3				169,01%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-3**, dari 5 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 5 indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan (rata-rata capaian sasaran ke-3 adalah sebesar 166,28%) atau berpredikat **amat baik**.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa terdapat 2 indikator yang pencapaiannya jauh diatas target, yaitu Presentase Pertumbuhan aset UMKM yang dibina (327,98%) dan Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina (169,68%). Hal ini didorong oleh kebijakan Pemerintah yang mendorong legalitas usaha bagi UMKM melalui Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) serta ekspansi kredit dari perbankan di Jawa Tengah. Per 30 November 2015, proporsi kredit Perbankan untuk sektor UMKM di Jawa Tengah mencapai 29,18% dari keseluruhan kredit usaha yang disalurkan.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka mendorong peningkatan capaian kinerja di masa yang akan datang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Mendorong pendampingan bagi Koperasi maupun UMKM melalui pihak terkait (Universitas, BDS, dan Perusahaan) secara terpadu.

2. Perlunya pola kerjasama dengan Perusahaan untuk memberikan kesempatan bagi KUMKM dalam melakukan *on the job training* guna meningkatkan keahlian dan ketrampilannya.

d. Sasaran ke-4 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-4 :

Tabel 10.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presen tase(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah	Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah	275 orang	330 orang	120%
Rata-Rata capaian sasaran ke-4				120%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-4**, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya melampaui target (120%) atau berpredikat **amat baik**. Adapun penyebab tingginya capaian kinerja dibanding target tersebut disebabkan antara lain :

1. Semangat dari masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya serta kisah sukses wirausahawan pemula, mendorong masyarakat mengikuti program penumbuhan wirausaha baru yang ditawarkan Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng
2. Dukungan dari segenap pihak terkait dalam pemberian pendampingan untuk mendorong penumbuhan wirausaha – wirausaha baru.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan kompetensi dari pendamping maupun praktisi pemberi materi.
2. Mengintegrasikan sistem pendampingan antar stakeholders.

e. Sasaran ke-5 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-5 :

Tabel 11.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM	Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM	11,75%	11,77%	100,17%
Rata-Rata capaian sasaran ke-5				100,17%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-5**, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya melampaui target (100,17%) atau berpredikat **amat baik**. Kondisi ini disebabkan antara lain :

1. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong pengembangan Koperasi dan UMKM melalui berbagai kebijakan yang pro KUMKM.
2. Pendampingan yang diberikan oleh segenap pihak mampu meningkatkan produktivitas KUMKM sehingga turut berkontribusi atas kenaikan penyerapan tenaga kerja.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Senantiasa mendorong pengembangan kualitas SDM pengurus/pengelola Koperasi dan UMKM melalui aneka diklat kompetensi maupun teknis sehingga mampu memperkuat daya saing KUMKM.
2. Meningkatkan efektivitas sistem pendampingan bagi KUMKM melalui koordinasi dan evaluasi secara berkala atas program yang telah dijalankan.

f. Sasaran ke-6 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-6 :

Tabel 12.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM	Pengelola KUMKM yang kompeten	14.175 orang	14.175 orang	100%
Rata-Rata capaian sasaran ke-6				100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-4**, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya sesuai target (100%) atau berpredikat **amat baik**. Adapun penyebab tingginya capaian kinerja dibanding target tersebut disebabkan antara lain :

1. Kesadaran pengurus/pengelola KUMKM bahwa kunci keunggulan bersaing dalam situasi perekonomian yang semakin dinamis adalah pada sumber daya manusia.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Senantiasa mendorong peningkatan kompetensi dari pendamping maupun praktisi pemberi materi.
2. Mengintegrasikan sistem pelatihan antar stakeholders guna meningkatkan kompetensi peserta pelatihan.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2015 dikategorikan **Amat Baik**.

Mengingat bahwa tahun 2014 merupakan tahun transisi antara RPJMD 2008 – 2013 dan RPJMD 2013 – 2018 serta Renstra Dinas Koperasi dan UMKM 2008 – 2013 dan Renstra 2013 – 2018 maka target kinerja pada tahun 2014 belum dapat dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2015. Hal ini disebabkan penyusunan

target kinerja tahun 2014 dilakukan pada tahun 2013, sehingga terdapat beberapa perbedaan antara target kinerja tahun 2014 dengan target tahun kinerja 2015 yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2013 – 2018 dan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM 2013 – 2018. Perbandingan kinerja baru dapat dilakukan mulai tahun 2015 dan seterusnya.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2015, yaitu :

a. Target Pendapatan

Pada tahun 2015, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 579.700.000,- namun ternyata pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 586.797.626,- atau dicapai sebesar 101,22%.

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15.
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	Presentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Pendidikan	89.000.000	98.000.000	9.000.000	110,11%
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	490.700.000	486.550.000	(4.150.000)	99,15%
3	Pendapatan dari Pengembalian	-	2.247.626	2.247.626	-
Jumlah 2015		579.700.000	586.797.626	7.097.626	101,22%
Capaian Tahun 2014		469.050.000	486.715.000	17.665.000	103,77%
Selisih (2015 – 2014)		110.050.000	100.082.626	(10.567.374)	

Berdasarkan tabel di atas terlihat terdapat kenaikan target pendapatan Tahun 2015 dibandingkan Tahun 2014 , yaitu dari semula Rp. 469.050.000,- menjadi Rp. 579.700.000,-. Meskipun terdapat kenaikan target pendapatan, berkat kerja keras dan upaya peningkatan sarana prasarana UPT Balatkop, target tersebut dapat terpenuhi bahkan

melampaui target. Realisasi pendapatan pada 2015 mencapai Rp. 586.797.626,- atau lebih besar Rp. 7.097.626,- (101,22%) dari target sebesar Rp. 579.700.000,-.

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2015

Pada tahun 2015 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 59.317.507.000,-, dengan serapan pada akhir tahun sebesar Rp. 57.148.297.642,- (96,34%) atau terdapat Sisa Lebih Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.169.209.538,-.

Anggaran sejumlah Rp. 59.317.507.000,- tersebut terdiri atas : (1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 20.407.516.000,- ; dan (2) Belanja Langsung sebesar Rp. 38.909.991.000,-

Apabila dilihat dari jenis belanja, maka realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 19.838.268.412,- (97,21%) dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp 20.407.516.000,- . Sementara untuk belanja langsung dari anggaran sebesar Rp. 38.909.991.000,- direalisasikan sebesar Rp. 37.310.029.050,- (95,89%).

Selanjutnya disajikan perincian data anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tahun 2015.

Tabel 16.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2015

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.407.516.000	19.838.268.412	569.247.588	97,21
II	BELANJA LANGSUNG	38.909.991.000	37.310.029.050	999.961.950	95,89
	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas	20.000.000	16.888.050	3.111.950	84,44%
	2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balatkop	5.000.000	4.972.500	27.500	99,45%
	3 Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Sekretariat Dinas	477.800.000	344.016.620	133.783.380	72,00%
	4 Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Balatkop	661.200.000	618.333.342	42.866.658	93,52%
	5 Jaminan Barang Milik Daerah	90.000.000	88.241.596	1.758.404	98,05%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas	370.000.000	369.514.000	486.000	99,87%
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balatkop	323.350.000	321.148.000	2.202.000	99,32%
8	Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat	400.000.000	400.000.000	-	100%
9	Penyediaan alat tulis kantor Balatkop	100.000.000	99.994.000	6.000	99,99%
10	Penyediaan barang cetak dan penggandaan Sekretariat	175.000.000	174.939.375	60.625	99,97%
11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balatkop	40.000.000	38.950.000	1.050.000	97,38%
12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Sekretariat	120.000.000	116.567.000	3.433.000	97,14%
13	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Balatkop	83.910.000	83.606.000	304.000	99,64%
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	150.000.000	149.084.000	916.000	99,39%
15	Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundang - undangan	60.000.000	59.442.000	558.000	99,07%
16	Penyediaan Makanan dan Minuman	80.000.000	79.712.500	287.500	99,64%
17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah.	1.818.700.000	1.817.216.901	1.483.099	99,92%
18	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Sekretariat Dinas	522.068.000	518.506.450	3.561.550	99,32%
19	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Balatkop	172.700.000	166.310.000	6.390.000	96,30%
20	Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	250.000.000	245.788.000	4.212.000	98,32%
	II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	202.000.000	198.831.826	3.168.174	98,43%
22	Rehab Gedung Kantor	420.000.000	410.085.000	9.915.000	97,64%
23	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Sekretariat Dinas	415.000.000	413.846.500	1.153.500	99,72%
24	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Balatkop	200.000.000	199.910.000	90.000	99,96%
25	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	692.368.000	653.772.311	38.595.689	94,43%
26	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Sekretariat	68.000.000	67.953.750	46.250	99,93%
27	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Balatkop	32.000.000	31.935.000	65.000	99,80%
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Sekretariat	400.000.000	398.944.900	1.055.100	99,74%
29	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Balatkop	270.000.000	269.750.000	250.000	99,91%
30	Peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat	1.048.000.000	1.028.540.000	19.460.000	98,14%
31	Peningkatan sarana dan prasarana kantor Balatkop	85.000.000	83.490.000	1.510.000	98,22%
	III Program Peningkatan Disiplin Aparatur.				
32	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	50.760.000	49.304.000	1.456.000	97,13%
	IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.				
33	Pendidikan dan Pelatihan Formal.	110.000.000	108.195.500	1.804..500	98,36%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
	V Program Pendidikan Non Formal dan Informal				
34	Pendidikan dan pelatihan masyarakat KUMKM	1.250.000.000	1.223.640.242	26.359.758	97,89%
	VI Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak				
35	Peningkatan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Usaha bagi Kelompok Wanita Usaha/Kopwan	105.000.000	97.500.000	7.500.000	92,86%
	VII Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM.				
36	Peningkatan Pemasarakatan dan Kelembagaan Koperasi	943.108.000	877.563.000	65.545.000	93,05%
37	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	1.063.065.000	1.057.065.000	6.000.000	99,43%
38	Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP	775.886.000	761.082.460	14.803.540	98,09%
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM	801.843.000	714.949.013	86.893.987	89,16%
	VIII Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha				
40	Peningkatan Jaringan Produk KUKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU)	240.273.000	238.572.400	1.700.600	99,29%
41	Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM	988.846.000	979.490.860	9.355.140	99,05%
42	Pelayanan Klinik Usaha bagi KUMKM	199.707.000	199.405.000	302.000	99,84%
	IX Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM				
43	Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM	341.864.000	311.431.400	30.432.600	91,10%
44	Kegiatan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.	2.545.000.000	2.432.795.216	112.204.784	95,59%
	X Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal				
45	Fasilitasi Perlindungan Produk UMKM	600.000.000	593.947.110	6.052.890	98,99%
46	Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	18.157.705.000	17.222.291.008	935.413.992	94,85%
	XI Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan				
47	Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM	741.435.000	730.547.950	10.887.050	98,53%
48	Pengendalian Pembiayaan KUMKM	547.453.000	541.701.780	5.751.220	98,95%
	JUMLAH BELANJA (I + II)	59.317.507.000	57.148.297.642	2.169.209.538	96,34%

BAB IV P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang koperasi dan UMKM pada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas atas program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng terkait pemberdayaan Koperasi dan UMKM perlu dilakukan evaluasi.

Dengan memperhatikan uraian dan paparan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Amat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (115,18%),
- b. Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan. Hal ini berarti terjadi efisiensi sebesar Rp. 2.169.209.538,- (3,66%) dari anggaran yang disediakan

Tingginya PPS sangat dipengaruhi oleh indikator sasaran ke-3 yaitu pada indikator peningkatan aset UMKM yang dibina, dimana target indikator tersebut hanya sebesar 11,15% tetapi realisasinya mampu mencapai 36,57% (naik 327,98%). Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan penyaluran pembiayaan bagi UMKM di Jawa Tengah dimana laporan Bank Indonesia menunjukkan bahwa realisasi penyaluran kredit bagi UMKM pada tahun 2015 mencapai Rp. 78,82 trilyun atau naik sebesar Rp. 8,41 trilyun (11,95%) dibanding tahun 2014 yang hanya sebesar Rp. 70,41 trilyun.

Apabila dilihat dari sisi pendapatan, dimana pada tahun 2015 Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng mampu memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp. 586.797.626,- atau lebih besar Rp. 7.097.626,- (101,22%) dari target pendapatan sebesar Rp. 579.700.000,-. Terlampauinya target tersebut disebabkan selain telah beroperasinya UMKM Center di Jl. Setiabudi 192 Semarang, juga telah selesainya

rehab gedung UPT Balatkop pada akhir 2014 lalu sehingga turut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng.

B. PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana perekonomian.
2. Masih lemahnya kapasitas serta kualitas sumber daya manusia dari pengurus/pengelola KUMKM di Jawa Tengah.
3. Keterbatasan jumlah aparatur serta kurangnya kompetensi dari aparatur pembina di Jawa Tengah akibat tingginya tingkat mutasi staf di Kabupaten/Kota.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keunggulan berkoperasi
 - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara kontinyu mengenai manfaat berkoperasi.
 - b. Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat, pra koperasi, serta koperasi di Jawa Tengah.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi.
 - d. Meningkatkan ketertiban administrasi dan kelembagaan Koperasi sesuai dengan Peraturan yang ber-laku
2. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi Pengurus/Pengelola KUMKM
 - a. Pengembangan kompetensi dan pengetahuan SDM KUMKM melalui aneka pendidikan dan pelatihan.
 - b. Mendorong penumbuhan jiwa kewirausahaan Pengurus/Pengelola KUMKM melalui *Achievement Motivational Training*.

- c. Meningkatkan kemitraan antara Dunia Usaha, Perguruan Tinggi maupun *stakeholders* lainnya dalam memberikan pendampingan maupun kesempatan *on the job training* bagi pelaku UMKM.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk perkuatan kapasitas aparatur pembina di daerah sehingga mampu memberikan pelayanan serta pembinaan kepada KUMKM secara optimal.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 untuk SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang

Semarang, Februari 2016

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ir. GAYATRI INDAH CAHYANI, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19570530 198403 2 002

Lampiran 1

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase Koperasi Aktif 2. Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas 3. Presentase Koperasi Sehat 4. Presentase omzet Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 80,71% 2. 32,75% 3. 15,70% 4. 6,25% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 81,20% 2. 40,41% 3. 15,96% 4. Data belum tersedia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100,61% 2. 123,39% 3. 101,66% 4. Data belum tersedia
Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jateng	Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	105 Produk	105 Produk	100%
Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi 2. Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina 3. Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi 4. Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina 5. Jumlah UMKM yang dibina 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12,85% 2. 9,75% 3. 12,20% 4. 10,20% 5. 92.000 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 23,74% 2. 44,77% 3. 12,82% 4. 20,85% 5. 99.681 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 184,75% 2. 459,18% 3. 105,08% 4. 204,41% 5. 108,35%
Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah	Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah	275 orang	330 orang	118%
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM	Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM	11,75%	11,77%	100,17%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM	Pengelola KUMKM yang kompeten	14.175 orang	14.175 orang	100%

Lampiran 2

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DINAS KOPERASI DAN UMKM
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.407.516.000	19.838.268.412	569.247.588	97,21
II	BELANJA LANGSUNG	38.909.991.000	37.310.029.050	999.961.950	95,89
	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas	20.000.000	16.888.050	3.111.950	84,44%
	2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balatkop	5.000.000	4.972.500	27.500	99,45%
	3 Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Sekretariat Dinas	477.800.000	344.016.620	133.783.380	72,00%
	4 Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Balatkop	661.200.000	618.333.342	42.866.658	93,52%
	5 Jaminan Barang Milik Daerah	90.000.000	88.241.596	1.758.404	98,05%
	6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas	370.000.000	369.514.000	486.000	99,87%
	7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balatkop	323.350.000	321.148.000	2.202.000	99,32%
	8 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat	400.000.000	400.000.000	-	100%
	9 Penyediaan alat tulis kantor Balatkop	100.000.000	99.994.000	6.000	99,99%
	10 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Sekretariat	175.000.000	174.939.375	60.625	99,97%
	11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balatkop	40.000.000	38.950.000	1.050.000	97,38%
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Sekretariat	120.000.000	116.567.000	3.433.000	97,14%
	13 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Balatkop	83.910.000	83.606.000	304.000	99,64%
	14 Penyediaan peralatan rumah tangga	150.000.000	149.084.000	916.000	99,39%
	15 Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundang - undangan	60.000.000	59.442.000	558.000	99,07%
	16 Penyediaan Makanan dan Minuman	80.000.000	79.712.500	287.500	99,64%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
	17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah.	1.818.700.000	1.817.216.901	1.483.099	99,92%
	18 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Sekretariat Dinas	522.068.000	518.506.450	3.561.550	99,32%
	19 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Balatkop	172.700.000	166.310.000	6.390.000	96,30%
	20 Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	250.000.000	245.788.000	4.212.000	98,32%
	II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	21 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	202.000.000	198.831.826	3.168.174	98,43%
	22 Rehab Gedung Kantor	420.000.000	410.085.000	9.915.000	97,64%
	23 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Sekretariat Dinas	415.000.000	413.846.500	1.153.500	99,72%
	24 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Balatkop	200.000.000	199.910.000	90.000	99,96%
	25 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	692.368.000	653.772.311	38.595.689	94,43%
	26 Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Sekretariat	68.000.000	67.953.750	46.250	99,93%
	27 Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Balatkop	32.000.000	31.935.000	65.000	99,80%
	28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Sekretariat	400.000.000	398.944.900	1.055.100	99,74%
	29 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Balatkop	270.000.000	269.750.000	250.000	99,91%
	30 Peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat	1.048.000.000	1.028.540.000	19.460.000	98,14%
	31 Peningkatan sarana dan prasarana kantor Balatkop	85.000.000	83.490.000	1.510.000	98,22%
	III Program Peningkatan Disiplin Aparatur.				
	32 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	50.760.000	49.304.000	1.456.000	97,13%
	IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.				
	33 Pendidikan dan Pelatihan Formal.	110.000.000	108.195.500	1.804.500	98,36%
	V Program Pendidikan Non Formal dan Informal				
	34 Pendidikan dan pelatihan masyarakat KUMKM	1.250.000.000	1.223.640.242	26.359.758	97,89%
	VI Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak				
	35 Peningkatan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Usaha bagi Kelompok Wanita Usaha/Kopwan	105.000.000	97.500.000	7.500.000	92,86%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
	VII Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM.				
36	Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi	943.108.000	877.563.000	65.545.000	93,05%
37	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	1.063.065.000	1.057.065.000	6.000.000	99,43%
38	Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP	775.886.000	761.082.460	14.803.540	98,09%
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM	801.843.000	714.949.013	86.893.987	89,16%
	VIII Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha				
40	Peningkatan Jaringan Produk KUKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU)	240.273.000	238.572.400	1.700.600	99,29%
41	Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM	988.846.000	979.490.860	9.355.140	99,05%
42	Pelayanan Klinik Usaha bagi KUMKM	199.707.000	199.405.000	302.000	99,84%
	IX Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM				
43	Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM	341.864.000	311.431.400	30.432.600	91,10%
44	Kegiatan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.	2.545.000.000	2.432.795.216	112.204.784	95,59%
	X Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal				
45	Fasilitasi Perlindungan Produk UMKM	600.000.000	593.947.110	6.052.890	98,99%
46	Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi	18.157.705.000	17.222.291.008	935.413.992	94,85%
	XI Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan				
47	Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM	741.435.000	730.547.950	10.887.050	98,53%
48	Pengendalian Pembiayaan KUMKM	547.453.000	541.701.780	5.751.220	98,95%
	JUMLAH BELANJA (I + II)	59.317.507.000	57.148.297.462	2.169.209.538	96,34%